

## BAB V PENUTUP

Pada bab lima ini disajikan rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan terhadap prasasti Munḍu<sup>o</sup>an yang berasal dari dukuh Toro, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini ditemukan pada tanggal 27 November 1969 dan telah diterbitkan pada Seminar Sejarah Nasional Indonesia II yang berlangsung pada tanggal 26 – 29 Agustus 1970 di Yogyakarta. Penerbitan dilakukan oleh Mohammad Umar yang meliputi pembacaan, pengalihaksaraan serta pengalihbahasaan. Namun masih diragukan terutama pada bagian penaggalan. Selain itu juga kritik atas prasasti ini belum dilakukan.

Prasasti Munḍu<sup>o</sup>an dipahatkan pada dua buah lempeng tembaga yang ukurannya sedikit berbeda satu sama lain. Lempeng pertama berukuran 9,5 x 32,2 cm, sedangkan lempeng ke dua berukuran 9,5 x 31,8 cm. Kedua lempeng prasasti Munḍu<sup>o</sup>an ini memiliki ketebalan yang rata, yakni 1 mm. Aksara-aksara yang dituliskan berukuran tinggi 0,5 cm dengan lebar bervariasi antara 0,4-0,6 cm. Masing-masing lempeng terdiri atas 7 baris. Keadaan prasasti Munḍu<sup>o</sup>an masih baik. Bagian sisi muka dan bagian belakang lempeng I berwarna coklat kemerahan dan tidak ada patinasi pada permukaannya, pada lempeng II, bagian muka dan belakangnya hampir semua ditutupi patinasi yang berwarna kehijauan. Bagian yang rusak pada lempeng I hanya ada di sebelah kanan, di lempeng II ada dibagian kiri dan kanan. Warna coklat kemerahan pada prasasti Munḍu<sup>o</sup>an menunjukkan bahwa campuran tembaga pada prasasti ini lebih banyak dibandingkan campuran logam lainnya.

Aksara yang dituliskan pada prasasti Munḍu<sup>o</sup>an adalah aksara Jawa Kuno. Begitu pula bahasa yang dipakai adalah Bahasa Jawa Kuno. Bentuk aksara yang dituliskan pada prasasti Munḍu<sup>o</sup>an adalah bentuk aksara Kawi awal yang berkembang sejak tahun 750 M hingga tahun 925 M, termasuk di dalamnya adalah aksara Kawi standar yang berkembang pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Balitung (856 - 910 M).

Prasasti Munḍu<sup>o</sup>an berisi penetapan sebidang tanah di desa Munḍu<sup>o</sup>an dan Haji Huma menjadi *sīma* yang diperuntukkan bagi pemeliharaan kambing milik raja. Pada lempeng I prasasti ini, ada keterangan mengenai sebab-sebabnya desa Munḍu<sup>o</sup>an dan Haji Huma dijadikan *sīma*. Lebih lanjut mengenai ketentuan siapa saja yang tidak boleh memasuki wilayah ini. Bagi yang melanggar akan menemui lima bahaya besar. Ketetapan ini berlaku hingga akhir zaman. Susunan prasasti yang tidak lengkap serta hilangnya beberapa bagian prasasti ini menjadi kendala utama ketika melakukan penafsiran.

Beberapa kesalahan dilakukan *citralekha*, misalnya penulisan kata *pasakpasak* di baris 2 lempeng II. Seharusnya adalah *pasēkpasēk* seperti yang dituliskan pada baris 6 lempeng II. Seperti prasasti berbahasa Jawa Kuno lainnya, prasasti Munḍu<sup>o</sup>an pun tidak berbeda. Bahasa yang dipergunakan cenderung singkat seperti bahasa yang digunakan untuk telegram. Ketidaklaziman yang paling mencolok adalah penggunaan aksara <sup>o</sup>*a* yang digunakan sebagai pengganti ligatur *-wa*. Selain itu, jika dalam sebuah kata ada vokal *u* dan *a* tidak akan berubah menjadi *wa* seperti pada umumnya hukum *sandhi*. Begitu pula dengan vokal rangkap *ai* tidak berubah menjadi *-e*. Selain aksara <sup>o</sup>*a*, aksara lain yang sering dipahatkan mandiri adalah aksara <sup>o</sup>*i* dan <sup>o</sup>*u*. Hal-hal seperti ini tergantung pada *citralekha*.

Penulisan aksara prasasti Munḍu<sup>o</sup>an cenderung stabil. Baik ukuran, bentuk maupun cara pemahatan aksara tidak banyak berubah-ubah. Sedangkan susunan isinya cenderung tidak beraturan dan tidak lengkap seperti halnya prasasti *sīma* yang dikeluarkan oleh raja atau penguasa resmi kerajaan. Setelah diteliti lebih lanjut, semua prasasti *sīma* yang dikeluarkan oleh penguasa *watak* memiliki permasalahan yang sama.

Penganugerahan status *sīma* pada abad ke-9 M lebih banyak dilakukan oleh penguasa *watak*—yang merupakan penguasa turun temurun—kepada desa-desa di bawah cakupan wewenang penguasa tersebut kepada seseorang atau sekelompok orang karena diberi kewajiban tertentu. Dalam hal ini, penganugerahan status *sīma* dilakukan oleh Rakai Patapān Pu Manuku kepada wakilnya yang bernama Sang Patoran dengan kewajiban (*buathaji*) memelihara kambing milik raja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang

penguasa *watak* mendukung keberadaan seorang raja dengan cara menyumbang tanah untuk dijadikan *sīma*.

Berdasarkan kritik ekstern yang telah dilakukan, baik dari segi bahan maupun bentuk aksara, prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an merupakan prasasti yang otentik berasal dari awal abad ke-9 M. Sedangkan kritik intern membuktikan bahwa prasasti ini dapat digunakan sebagai data sejarah yang kredibel. Susunan isi prasasti ini tidak lengkap; hanya menyebutkan bagian-bagian yang pentingnya saja. Secara garis besar susunan isi prasasti ini adalah: *manggala*, penanggalan, nama penguasa wilayah, *sambandha*, serta nama-nama pejabat yang menerima *pasēkpasēk*.

Demikian kesimpulan yang dapat diperoleh. Masih terbuka kemungkinan penelitian lebih lanjut terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Jawa Kuno yang melatarbelakangi penulisan sebuah prasasti. Namun diharapkan hasil penelitian ini dapat mengisi dan melengkapi penulisan sejarah Indonesia kuno, khususnya pada masa awal Kerajaan Mataram kuno.